BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

- 1. Dalam kasus penipuan secara bersama-sama, hakim menilai bahwa Rano Karno Bin Yusdi bersalah berdasarkan bukti yang kuat dan sesuai dengan ketentuan Pasal 378 KUHP dan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Hukuman penjara selama tiga tahun dijatuhkan kepadanya, dan masa tahanan yang sudah dijalani akan dikurangi dari masa hukuman tersebut. Hakim juga mempertimbangkan berbagai faktor, baik kelebihan maupun kekurangan terdakwa, agar keputusan hukum yang diambil dapat menegakkan keadilan dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
- 2. Berdasarkan fakta hukum yang ada, semua unsur dalam Pasal 378 KUHP juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi. Oleh karena itu, terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penipuan secara bersama-sama. Selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan alasan yang dapat menghilangkan pertanggungjawaban pidana terdakwa. Dengan demikian, terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman pidana. Proses persidangan berlangsung tanpa hambatan dan alat bukti yang diajukan sudah cukup untuk membuktikan kesalahan terdakwa. Penegakan hukum dalam perkara ini juga telah dilaksanakan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berlaku. Namun, dalam tahap penyidikan dilakukan tindakan paksa berupa pemanggilan, penyitaan, penangkapan, dan penahanan karena terdakwa tidak

memenuhi panggilan pemeriksaan.

B. Saran

- 1. Peraturan perundang-undangan perlu lebih tegas dalam menindak tindak pidana penyertaan, terutama dalam hal pemberian sanksi, sebab saat ini belum terdapat ketentuan yang jelas terkait penjatuhan hukuman. Hal ini penting agar setiap pelaku tindak pidana tidak dapat bertindak sewenang-wenang terhadap hukum yang berlaku di Indonesia. Penegakan hukum harus konsisten dan tegas terhadap pelaku kejahatan.
- 2. Masyarakat sebagai bagian dari negara hendaknya turut aktif melakukan pengawasan terhadap lembaga yudikatif dalam menjalankan tugasnya. Selain itu, masyarakat juga harus berperan dalam menjaga keamanan dan ketertiban sosial guna menekan angka kriminalitas.